

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Kemiskinan

a. Pengertian Kemiskinan

Umumnya kemiskinan terpusat di tempat tertentu seperti pedesaan atau daerah yang kekurangan sumber daya. Masalah kemiskinan berkaitan dengan masalah lingkungan (Rustiadi, 2018). Kemiskinan diartikan sebagai rendahnya kebutuhan dasar. Konferensi Internasional Labour Organization (1976) merumuskan kebutuhan sebagai berikut:

- 1) Kebutuhan minimum akan konsumsi pokok.
- 2) Pelayanan konsumsi kolektif secara esensial meliputi air minum sehat, sanitasi, tenaga listrik, angkutan umum, fasilitas kesehatan atau pendidikan yang disediakan komunitas.
- 3) Partisipasi masyarakat dalam pembuatan keputusan.
- 4) Terpenuhinya tingkat absolut kebutuhan dasar.
- 5) Penciptaan lapangan kerja baik sebagai alat maupun tujuan setrategi kebutuhan dasar (Affandi, Zulham dan Gunawan, 2017).

Menurut Bank Dunia, kemiskinan ialah keadaan kelaparan, kurang tempat tinggal, sandang dan pendidikan. Beberapa hal yang menyebabkan kemiskinan:

- 1) Rendahnya pendapatan guna memenuhi kebutuhan dasar

- 2) Ketidakmampuan bersuara di depan institusi.
- 3) Rentan adanya guncangan ekonomi (Nursalam, 2012).

Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kemiskinan yaitu kondisi seseorang yang tidak dapat menikmati pilih pemenuhan kebutuhan dasarnya, seperti tidak dapat memenuhi kesehatan, standar hidup, kebebasan, harga diri dan rasa dihormati seperti orang lain (Sukmaraga, 2011).

b. Kemiskinan Menurut Bentuk

1) Kemiskinan Absolut

Seseorang dikatakan miskin absolut jika hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan dan tidak cukup menentukan kebutuhan dasar. Konsep ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik terhadap makanan, pakaian, dan perumahan. Kesulitan utama dalam konsep ini adalah menentukan komposisi dan tingkat kebutuhan minimum karena hal tersebut dipengaruhi oleh adat kebiasaan, iklim, tingkat kemajuan negara, dan faktor ekonomi. Untuk hidup layak, seseorang membutuhkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan fisik dan sosialnya.

2) Kemiskinan Relatif

Seseorang dikatakan miskin relatif apabila dapat memenuhi kebutuhan dasar, tetapi jauh lebih rendah dibandingkan keadaan masyarakat sekitar. Garis kemiskinan mengalami perubahan bila

tingkat hidup masyarakat berubah sehingga konsep kemiskinan ini bersifat dinamis. Kemiskinan dari aspek ketimpangan sosial yang berarti semakin besar ketimpangan antara tingkat penghidupan golongan atas dan bawah, akan semakin besar pula jumlah penduduk yang dapat dikategorikan miskin.

3) Kemiskinan kultural

Kemiskinan kultural mengacu pada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan faktor budaya, tidak mau berusaha memperbaiki kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar.

4) Kemiskinan struktural

Situasi miskin yang disebabkan oleh rendahnya akses terhadap sumber daya dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial (Suharto, 2015).

c. Ukuran Kemiskinan

Tingkat kemiskinan menurut Biro Pusat Statistik didasarkan pada jumlah konsumsi rupiah berupa makanan sebesar 2100 kalori per orang dalam sehari, dan konsumsi non makanan. Patokan kecukupan ini berlaku untuk semua umur, jenis kelamin, dan tingkat kegiatan fisik, berat badan, serta status fisiologis penduduk, ukuran ini sering disebut garis kemiskinan. Penduduk yang memiliki pendapatan dibawah garis kemiskinan dikatakan sebagai warga miskin (Suliswanto, 2010).

Sedangkan kriteria kemiskinan menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional sebagai berikut (Astuti dkk, 2017):

1) Kriteria Keluarga Pra Sejahtera (Pra KS)

Kriteria Keluarga Pra Sejahtera yaitu keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (*basic need*) secara minimal seperti kebutuhan akan spiritual, pangan, sandang, papan, kesehatan dan KB.

Indikator Keluarga Pra Sejahtera meliputi:

- a) Melaksanakan ibadah menurut agama oleh masing-masing anggota keluarga.
- b) Seluruh anggota keluarga makan dua kali atau lebih dalam sehari.
- c) Seluruh anggota keluarga mempunyai pakaian yang berbeda untuk aktivitas (misalnya di rumah, bekerja, sekolah dan bepergian).
- d) Bagian yang terluas dari lantai rumah bukan dari tanah.
- e) Bila anak sakit dan atau pasangan usia subur ingin ber KB dibawa ke sarana kesehatan.

2) Kriteria Keluarga Sejahtera 1

Kriteria Keluarga Sejahtera 1 merupakan keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologinya seperti kebutuhan akan pendidikan, KB, interaksi lingkungan tempat tinggal dan transportasi. Keluarga Sejahtera 1 yakni keluarga yang kebutuhan dasar telah

terpenuhi namun kebutuhan sosial psikologi belum terpenuhi.

Indikator Keluarga Sejahtera 1 sebagai berikut:

- a) Anggota keluarga melaksanakan ibadah secara teratur.
- b) Paling kurang sekali seminggu keluarga makan daging atau ikan atau telur.
- c) Setahun terakhir seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru.
- d) Luas lantai rumah paling kurang 8 m untuk tiap pengguna rumah.
- e) Seluruh anggota keluarga sehat dalam tiga bulan terakhir.
- f) Paling kurang satu anggota keluarga yang umurnya diatas 15 tahun punya penghasilan tetap.
- g) Seluruh anggota keluarga yang berusia 10-60 tahun dapat baca tulis huruf latin.
- h) Seluruh anak berusia 5-15 tahun bersekolah.
- i) Bila anak hidup 2 atau lebih, keluarga pasangan usia subur memakai alat kontrasepsi (kecuali sedang hamil).

Rumus ukuran kemiskinan menurut Foster-Greer-Thorbecke:

$$Pa = 1 - \sum_{i=1}^q \frac{y_i}{z} [z - y_i]^a$$

Dimana:

$$a = 0, 1, 2$$

$$z = \text{Garis kemiskinan}$$

y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan ($i = 1, 2, 3, \dots, q$), $y < z$.

q = Banyaknya penduduk dibawah garis kemiskinan.

n = Jumlah penduduk

Jika:

- 1) $a = 0$, diperoleh Head Count Index (0P), persentase penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan.
- 2) $a = 1$, diperoleh Poverty Gap Index (1P), indeks kedalaman kemiskinan, ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indek, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.
- 3) $a = 2$, diperoleh Poverty Severity (2P), indeks keparahan kemiskinan, memberikan gambaran penyebaran pengeluaran penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indek, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran antara penduduk miskin (Abie, 2017).

Fakta menunjukkan, negara yang jumlah penduduknya besar tingkat kemiskinannya juga lebih besar. Thomas Robert Malthus dalam Todaro menyatakan pertumbuhan penduduk yang tidak dikendalikan akan menghabiskan sumber daya alam, sehingga memunculkan penyakit, kelaparan dan penderitaan (Abie, 2017). Oleh karena itu

perlu upaya mengendalikan jumlah penduduk dengan melakukan program Keluarga Berencana (KB) (Suliswanto, 2010).

2. Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Sukirno (dalam Giovanni, 2018) laju pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan PDRB tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil. Selanjutnya pembangunan ekonomi tidak semata-mata diukur berdasarkan pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) secara keseluruhan, tetapi harus memperhatikan sejauh mana distribusi pendapatan telah menyebar kelapisan masyarakat serta siapa yang telah menikmati hasil-hasilnya. Sehingga menurunnya PDRB suatu daerah berdampak pada kualitas konsumsi rumah tangga. Dan apabila tingkat pendapatan penduduk sangat terbatas, banyak rumah tangga miskin terpaksa merubah pola makanan pokoknya ke barang paling murah dengan jumlah barang yang berkurang.

Pertumbuhan ekonomi merupakan pertambahan relatif nilai barang dan jasa dalam satu periode (satu tahun). Pertambahan nilai barang dan jasa ini dapat dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Nilai barang dan jasa dalam PDRB meningkat karena jumlah dan harga dari barang dan jasa itu sendiri. Untuk menghilangkan pengaruh kenaikan harga, maka pertumbuhan ekonomi dihitung dengan nilai PDRB atas dasar harga konstan (Ramdhan dkk, 2017).

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah/provinsi dalam suatu periode tertentu ditunjukkan oleh data

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan PDRB sebagai nilai tambah yang dihasilkan unit usaha dalam wilayah tertentu, atau diartikan jumlah seluruh nilai produk akhir yang dihasilkan seluruh unit ekonomi di suatu wilayah (BPS, 2019).

Menurut pendekatan pendapatan, PDRB merupakan jumlah balas jasa dalam jangka waktu tertentu yang diterima faktor produksi berupa upah dan gaji, sewa rumah, bunga modal dan keuntungan yang ikut serta dalam proses produksi di suatu wilayah. Perhitungan dilakukan sebelum adanya potongan pajak baik penghasilan maupun lainnya (Tangkilisan, 2005).

Cara penyajian Produk Domestik Regional Bruto disusun sebagai berikut (Pamungkas, 2018):

- a. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan, yaitu jumlah nilai produksi, pengeluaran atau pendapatan yang dihitung berdasarkan harga tetap. Dilakukan penilaian kembali dasar harga dengan menggunakan indeks harga konsumen yang nantinya mencerminkan tingkat kegiatan real ekonomi melalui Produk Domestik Regional Bruto.
- b. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku, adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian disuatu wilayah. Nilai tambah merupakan nilai yang diberikan pada barang dan jasa yang dipakai unit produksi dalam

proses produksi. Dalam proses produksi, nilai tambah sama dengan balas jasa atas ikut sertanya faktor produksi (Pamungkas, 2018).

Ukuran pembangunan PDB dalam konteks nasional dan PDRB dalam konteks regional, hanya memotret pembangunan ekonomi. Untuk itu dibutuhkan indikator yang komprehensif, mampu menangkap perkembangan ekonomi dan perkembangan aspek sosial maupun kesejahteraan manusia (Ali, 2009).

3. Indek Pembangunan Manusia

a. Pengertian Indek Pembangunan Manusia

Badan Pusat Statistik menjelaskan Indeks pembangunan manusia (IPM) ialah ukuran capaian pembangunan manusia berbasis komponen dasar kualitas hidup yang menggambarkan beberapa komponen, yaitu capaian umur panjang dan sehat yang mewakili dalam bidang kesehatan; angka melek huruf, partisipasi sekolah dan rata-rata lamanya bersekolah mengukur kinerja pembangunan bidang pendidikan; dan kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita (Ali, 2009).

b. Komponen Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia mempunyai empat komponen utama yaitu produktifitas (*productivity*), pemerataan (*equity*), kesinambungan (*sustainability*) dan pemberdayaan (*empowerment*). Peningkatan komponen secara maksimal akan menghasilkan pembangunan manusia

dengan baik karena peran manusia merupakan agen pembangunan yang efektif (Ali, 2009).

IPM disusun dengan mengacu pada angka harapan hidup (*life expectancy at age 0 = e0*), angka melek huruf penduduk dewasa (*adult literacy rate = Lit*), rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling = MYS*), *Purchasing Power Parity* (ukuran pendapatan yang sudah disesuaikan dengan paritas daya beli (Indonesia Statistik, 2012).

IPM ialah capaian ukuran pembangunan manusia berbasis komponen dasar kualitas hidup dengan menggambarkan komponencapaian umur panjang dan sehat dalam bidang kesehatan, angka melek huruf, partisipasi sekolah, dan rata-rata lamanya bersekolah mengukur kinerja pembangunan bidang pendidikan dan kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran perkapita (Hermawan, 2018).

4. Tingkat Pengangguran Terbuka

a. Pengertian

Sukirno (dalam Ramdhan dkk, 2017) mengatakan bahwa pengangguran adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja, yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkan. Tingkat pengangguran menunjukkan persentase dari individu-individu yang ingin bekerja namun tidak memiliki pekerjaan.

Seseorang dianggap menjadi penganggur jika tidak bekerja namun masih menunggu untuk mendapatkan pekerjaan.

Definisi pengangguran menurut International Labor Organization (ILO) (Imsar, 2018):

- 1) Pengangguran terbuka adalah seorang penduduk usia kerja yang selama periode tertentu tidak bekerja, bersedia menerima pekerjaan, serta sedang mencari pekerjaan.
- 2) Setengah pengangguran terpaksa adalah pekerja buruh karyawan dan mandiri yang selama periode tertentu terpaksa bekerja kurang dari jam kerja normal, yang masih mencari pekerjaan lain atau masih bersedia mencari pekerjaan lain/tambahan (BPS, 2001: 4).

b. Faktor-Faktor Pengangguran

- 1) Kebijakan Pemerintah tidak berpihak pada rakyat

Banyak kebijakan Pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat dan menimbulkan pengangguran baru, seperti kenaikan BBM yang menambah pengangguran sekitar 1 juta orang. Kebijakan Pemerintah yang menekankan pertumbuhan ekonomi bukan pemerataan juga mengakibatkan banyak pengangguran. Pembukaan industri tanpa memperhatikan dampak lingkungan mengakibatkan pencemaran dan mematikan lapangan kerja yang sudah ada.

- 2) Pengusaha selalu mengejar keuntungan dengan menerapkan sistem pegawai kontrak (*outsourcing*)

Saat ini perusahaan lebih sering menerapkan sistem kontrak karena dinilai lebih menguntungkan. Apabila mempunyai pegawai tetap, akan dibebankan pada biaya tunjangan ataupun dana pension. Namun pegawai kontrak bisa seenaknya mengambil ketika butuh atau ada proyek besar dan kemudian membuangnya setelah proyek sudah berakhir. Hal ini membuat perusahaan tidak perlu membuang biaya besar, namun memunculkan pengangguran.

- 3) Faktor keahlian

Inovasi dan kreatif merupakan hal yang penting. Meskipun berpendidikan rendah, jika seseorang itu mempunyai keahlian dan keterampilan, maka bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Umumnya masyarakat Indonesia malas bekerja keras dari nol, sehingga banyak pengangguran tercipta.

B. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian skripsi untuk menghindari terjadinya plagiasi terhadap sebuah karya tulis dan supaya penelitian skripsi ini lebih maksimal maka penulis perlu mengetahui karya tulis yang telah ada sebelumnya. Penelitian yang sudah pernah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Prasetyoningrum dan Sukmawati (2018), menganalisis tentang “Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi

dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Indonesia”. Penulis menggunakan variabel IPM, pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan kemiskinan. Hasil penelitian menunjukkan IPM berpengaruh langsung dan negatif terhadap tingkat kemiskinan, pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan. pengangguran berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Penelitian juga menunjukkan bahwa pengangguran dapat memediasi IPM dengan kemiskinan dan memediasi pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan.

2. Saputra (2011) “Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB, IPM, Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Jawa Tengah”. Penulis menggunakan variabel IPM, pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan kemiskinan. Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan jumlah penduduk berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemiskinan, PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, dan Pengangguran berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan.
3. Syaifullah dan Malik (2014). “Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Produk Domestik Bruto terhadap Tingkat Kemiskinan di ASEAN-4”. Penulis menggunakan variabel IPM, pertumbuhan ekonomi, dan kemiskinan. Hasil penelitian disimpulkan Indeks Pembangunan Manusia memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Produk Domestik Bruto memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan di ASEAN-4.

4. Agustina, Syechalad dan Hamzah (2018), menganalisis tentang “Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pengangguran dan Tingkat Pendidikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Aceh”. Penulis menggunakan variabel tingkat pengangguran dan jumlah penduduk miskin. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tingkat pengangguran dan tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan sedangkan jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.
5. Fadlillah, Sukiman dan Dewi (2016), menganalisis tentang “Analisis Pengaruh Pendapatan Per Kapita, Tingkat Pengangguran, IPM dan Pertumbuhan Penduduk terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2009-2013”. Penulis menggunakan variabel indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran terbuka dan kemiskinan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan pendapatan kapita menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah, tingkat pengangguran terbuka positif dan berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah, indeks pembangunan manusia dan pengaruh negatif signifikan terhadap penduduk miskin di Jawa Tengah. jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah, dan pertumbuhan penduduk yang berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan. Dari ketiga variabel tersebut, yang memiliki koefisien signifikan pendapatan per

kapita adalah, sehingga pendapatan per kapita adalah yang paling elastis terhadap populasi miskin.

6. Latifah, Rotinsulu dan Tumilaar (2017) menganalisis tentang “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka dan Dampaknya pada Jumlah Penduduk Miskin di Kota Manado”. Penulis menggunakan variabel PDRB, IPM, pengangguran dan kemiskinan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa *fixed effect model* (FEM) adalah model regresi data panel yang paling tepat. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ada hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia terhadap tingkat pengangguran terbuka namun tidak berpengaruh signifikan. Begitu juga dengan pertumbuhan ekonomi dan indeks manusia terhadap jumlah penduduk miskin, tidak terdapat pengaruh yang signifikan. Akan tetapi terdapat pengaruh signifikan antara indeks pembangunan manusia terhadap jumlah penduduk miskin melalui tingkat pengangguran terbuka di Kota Manado.
7. Didu dan Fauzi (2016) menganalisis tentang Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Lebak. Penulis menggunakan variabel jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. Hasil penelitian diketahui variabel jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan; variabel pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan

terhadap kemiskinan dan variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.

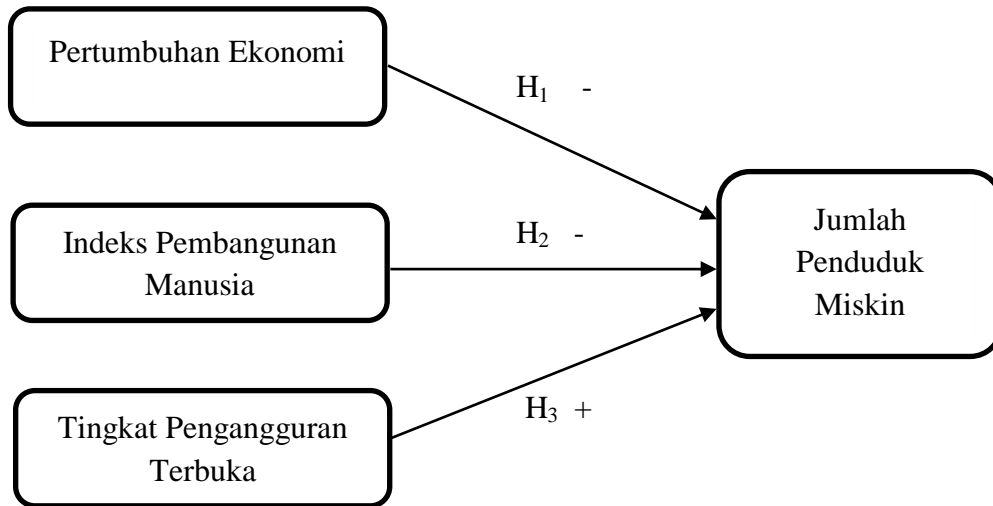
8. Silastri (2017) dengan penelitian berjudul pengaruh jumlah penduduk dan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap kemiskinan di Kabupaten Kuantan Singingi. Penulis menggunakan variabel jumlah penduduk, Pendapatan Domestik Regional Bruto dan kemiskinan. Hasil penelitian diketahui jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, Pendapatan Domestik Regional Bruto berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.
9. Giovanni (2018) dengan penelitian berjudul “Analisis Pengaruh PDRB, Pengangguran dan Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan di Pulau Jawa Tahun 2009-2016. Penulis menggunakan variabel Pendapatan Domestik Regional Bruto, tingkat pengangguran terbuka dan kemiskinan. Hasil penelitian diketahui pengangguran dan pendidikan tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2009-2016, sedangkan PDRB berpengaruh terhadap kemiskinan di provinsi tersebut.
10. Usman dan Diramita (2016), menganalisis tentang “Pengaruh Jumlah Penduduk, Pengangguran, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau”. Penulis menggunakan variabel tingkat pengangguran terbuka, pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan secara parsial dapat disimpulkan bahwa Jumlah Penduduk berpengaruh secara signifikan dan

negatif terhadap Kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau. Secara parsial dapat disimpulkan bahwa Pengangguran tidak berpengaruh terhadap Kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau. Secara parsial dapat disimpulkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap Kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau. Besarnya Pengaruh Jumlah Penduduk, Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 0,9511 atau 95,11%.

C. Hipotesis

Hipotesis yang ditunjukkan dalam analisis dalam penelitian ini adalah:

1. H1 : Pertumbuhan ekonomi diduga berpengaruh negatif terhadap jumlah pengangguran di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. H2 : Indeks Pembangunan Manusia diduga berpengaruh negatif terhadap jumlah pengangguran di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. H3 : Tingkat pengangguran terbuka diduga berpengaruh positif terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. Kerangka Berpikir**Gambar 2.1 Kerangka Berpikir**